

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian internal dari pembangunan nasional, karena pembangunan di daerah menjadi salah satu penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kabupaten dan kota untuk bertindak sebagai pelaksana, sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Keberhasilan pemerintah daerah tidak terlepas dari manajemen pengelolaan keuangannya karena keuangan daerah merupakan urat nadi keberlangsungan pemerintahan dan aktivitas pokok yang sangat mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Apabila ditelusur secara rinci pengelolaan keuangan daerah akan bersumber pada saat pemerintah daerah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sampai dengan pertanggungjawaban kepala

daerah pada badan legislatif. Dengan diterapkannya penyusunan anggaran berbasis kinerja berarti semua kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan pada *output* bukan lagi pada *input*. Anggaran semacam ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dengan menerapkan konsep *value for money* yaitu ekonomis, efektif dan efisien sehingga kinerja pemerintah daerah lebih mudah diukur.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, daerah harus menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah apa sudah dilakukan secara efisien dan efektif.

Dalam akuntansi sektor publik (Halim, 2012), pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nasib daerah karena apabila suatu daerah dapat memanfaatkan anggaran yang ada dengan memaksimalkan mungkin akan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada serta menurunkan tingkat kemiskinan. Pengelolaan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah harus dipergunakan sebagai untuk menentukan besarnya

pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan.

Sumatera Selatan sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan potensi pendapatan daerahnya guna mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan. Kinerja keuangan di Sumatera Selatan di tahun 2015, 2016, dan 2017 yang dilihat dari pendapatan dalam anggaran APBD mengalami kenaikan di tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan mengalami peningkatan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang dilihat dari BPS, dimana tingkat pengangguran di tahun 2016 hanya sebesar 4,31% mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 6,07% artinya mengalami penurunan sebesar 1,76% tetapi di tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,08% menjadi sebesar 4,39%. Berbeda dengan tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan setiap tahunnya tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar untuk tingkat kemiskinan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, desentralisasi fiskal, dan lainnya. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang akan dibahas yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan sebagai kajian ranah akuntansi sektor publik (Halim, 2012).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Menurut Mahmudi (2010), rasio kemandirian dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan

transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi daerah yang diukur dengan PAD terhadap total pendapatan daerah. Namun memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah pertumbuhan ekonomi daerahnya, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Hamzah (2008), Ani dan Dwirandra (2014), Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), Andriyani (2014), dan Sari, dkk (2016), bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diharapkan semakin mandiri suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, berkurangnya tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang menurun.

Menurut Halim (2012), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan. Suatu daerah dapat dikatakan efektif bila jumlah realisasi penerimaan PAD lebih besar dibandingkan target penerimaan PAD dan begitu pula sebaliknya. Rasio efektivitas keuangan daerah diukur dengan cara realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2014), Andriyani (2014), dan Sari, dkk (2014), bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semakin efektif keuangan daerah dalam pengalokasian penerimaan pendapatan sesuai dengan yang telah ditargetkan

sehingga pertumbuhan akan meningkat, berkurangnya tingkat pengangguran, dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah yang diasumsikan bahwa dana yang dikeluarkan untuk dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Penelitian yang dilakukan Hamzah (2008), Nurulita (2018), Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), dan Andriyani (2014), bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semakin efisien keuangan daerah maka akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi, berkurangnya tingkat pengangguran dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Menurut Mahmudi (2010), rasio pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaiknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan PAD. Penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) dan Andriyani (2014), bahwa rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan

PAD dapat melihat pertumbuhan mengarah ke arah yang positif atau negatif, jika pertumbuhan PAD ke arah yang positif maka dapat melihat pengaruhnya untuk pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan.

Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Hamzah (2007), menyebutkan bahwa secara spesifik ada tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Hamzah (2008) dan Sudrajat dan Sukmasari (2011), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Namun berbeda dengan Hamzah (2008), Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

Pada penelitian ini mengacu pada Hamzah (2008), penelitian menggunakan empat variabel independen yaitu rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Pada penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan PAD dengan menggunakan *path analysis*. Peneliti menguji variabel tersebut karena hasil penelitian tentang kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi,

pengangguran dan kemiskinan masih menghasilkan temuan jika diterapkan pada objek yang berbeda. Pemilihan objek penelitian yaitu kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN: PENDEKATAN ANALISIS JALUR (STUDI PADA KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA SELATAN)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan dengan pendekatan analisis jalur. Faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, dan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. a. Apakah rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
- b. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengintervensi rasio kemandirian terhadap pengangguran?
- c. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengintervensi rasio kemandirian terhadap kemiskinan?

2.
 - a. Apakah rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
 - b. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengintervensi rasio efektivitas terhadap pengangguran?
 - c. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengintervensi rasio efektivitas terhadap kemiskinan?
3.
 - a. Apakah rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
 - b. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengintervensi rasio efisiensi terhadap pengangguran?
 - c. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengintervensi rasio efisiensi terhadap kemiskinan?
4.
 - a. Apakah rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
 - b. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengintervensi rasio pertumbuhan PAD terhadap pengangguran?
 - c. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengintervensi rasio pertumbuhan PAD terhadap kemiskinan?
5.
 - a. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran?
 - b. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada analisis kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan dengan pendekatan analisis jalur (studi pada kota dan kabupaten di Sumatera Selatan) tahun 2015, 2016, dan 2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka secara rinci tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. a. Menganalisis rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
- b. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam mengintervensi rasio kemandirian terhadap pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
- c. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam mengintervensi rasio kemandirian terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
2. a. Menganalisis rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.

- b. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam mengintervensi rasio efektivitas terhadap pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
 - c. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam mengintervensi rasio kemandirian terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
 3.
 - a. Menganalisis rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
 - b. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam mengintervensi rasio efisiensi terhadap pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
 - c. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam mengintervensi rasio efisiensi terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
 4.
 - a. Menganalisis rasio pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
 - b. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam mengintervensi rasio pertumbuhan PAD terhadap pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.

- c. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam mengintervensi rasio pertumbuhan PAD terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
5. a. Menganalisis pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.
 - b. Menganalisis pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, 2016, dan 2017.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dari pengetahuan di bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan dengan pendekatan analisis jalur.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisi yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di Sumatera Selatan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sumber referensi, literatur dan informasi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan dengan pendekatan analisis jalur.
